

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pemilihan Umum DPRD Kota Tegal Tahun 2014 sudah berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Meskipun sempat dilakukan pemilihan ulang di beberapa TPS, pada akhirnya pemilihan ulang tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 15 partai peserta Pemilu dan sudah didapat jumlah perolehan suara yang sah.

Hasil rekapitulasi menyebutkan untuk dapil 1 (Tegal Selatan) jumlah suara sah sebanyak 32.538, dapil 2 (Margadana) sebanyak 23.405, dapil 3 (Tegal Barat) sebanyak 34.064 dan dapil 4 (Tegal Timur) sebanyak 40.722. Total jumlah perolehan suara sah untuk wilayah kota Tegal sebanyak 130.729. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang sah untuk 30 kursi di DPRD Kota Tegal terdistribusi pada 10 partai politik saja, dengan-pembagian 10 kursi atau setara dengan 33,33 % untuk perempuan dan 20 kursi atau setara dengan 66,67 % untuk laki-laki. Artinya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal tahun 2014 telah memenuhi kuota untuk kaum perempuan.

Namun, pada Pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2019 yang berlangsung secara aman, lancar, dan tanpa kecurangan diperoleh hasil rekapitulasi sah untuk 30 kursi anggota DPRD Kota Tegal yang terdistribusi pada 7 partai politik, dan hanya ada empat perempuan yang terpilih, tiga adalah petahana dan satu merupakan wajah baru.

Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2019 menyebutkan untuk dapil 1 (Tegal Selatan) jumlah perolehan suara sah

sebanyak 37.398, dapil 2 (Margadana) sebanyak 26.649, dapil 3 (Tegal Barat) sebanyak 37.923 dan dapil 4 (Tegal Timur) sebanyak 46.572. Total jumlah perolehan suara sah untuk wilayah Kota Tegal sebanyak 148.542.

Tabel 1.1

Perbandingan Hasil Pemilu DPRD Kota Tegal 2014 dan 2019

No	Partai Politik	Kursi Hasil Pemilu 2014	Kursi Hasil Pemilu 2019
1	PDIP	8	7
2	PKB	5	6
3	Partai Golkar	4	5
4	PKS	3	4
5	PAN	2	3
6	Partai Demokrat	2	2
7	Partai Gerindra	2	3
8	PPP	1	0
9	Partai Hanura	2	0
10	Partai Nasdem	1	0
Kursi DPRD Kota Tegal		30	30

Sumber : KPU Kota Tegal (diolah), 2019

Tabel 1.1 di atas menunjukkan makin sedikit jumlah partai politik yang mampu memperoleh kursi di DPRD Kota Tegal. Seperti PPP, Partai Hanura dan Partai Nasdem gagal mempertahankan kursi tunggalnya. Selain ada partai politik yang gagal dan yang berhasil dalam meraih kursi di DPRD Kota Tegal, ada pola yang serupa untuk petahana perempuan.

Tabel 1.2

Anggota DPRD Kota Tegal Tahun 2014 dan tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Anggota DPRD Kota Tegal	
	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Perempuan	10 (33,33%)	4 (13,33%)
Laki-laki	20 (66,67%)	26 (86,67%)

Sumber : diolah oleh Peneliti

Tabel 1.2 diatas menunjukkan terjadi penurunan drastis persentase perempuan di DPRD Kota Tegal yaitu dari 33,33 % di hasil pemilihan umum DPRD 2014 menjadi 13,33 % di hasil pemilihan umum DPRD 2019. Mayoritas petahana perempuan tersebut mencalonkan kembali di pemilu Kota Tegal tahun 2019, namun sebagian besar petahana perempuan gagal. Mereka yang gagal termasuk petahana perempuan yang berasal dari partai politik yang mampu bertahan di DPRD Kota Tegal.

Tabel 1.3

Anggota DPRD Kota Tegal Perempuan Tahun 2014 dan 2019

Nama	Pemilu 2014	Nama	Pemilu 2019
Tuti Alawiyah	Menjabat	Nur Fitriani	Petahana
Nur Fitriani	Menjabat	Ely Farisati	Baru
Enny Yuningsih	Menjabat	Rosalina	Petahana
Ely Rosana	Menjabat	Enny Yuningsih	Petahana
Efi Ifanah	Menjabat		
Rosalina	Menjabat		
Wiwik Mastuti	Menjabat		
Sri Puji Astuti	Menjabat		

Sumber : diolah oleh peneliti

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa pada pemilu tahun 2014 terdapat sebanyak 8 (delapan) perempuan yang berhasil menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tegal, akan tetapi pada pemilu tahun 2019 hanya terdapat 4 (empat) perempuan yang berhasil menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tegal. Dari empat perempuan yang menjabat pada pemilu 2019 terdapat seorang pendatang baru yaitu Ely Farisati yang merupakan kakak kandung dari petahana Nur Fitriani bahkan keduanya datang dari partai yang sama yaitu

Partai Amanat Nasional dan dari dapil yang sama yaitu dapil Kota Tegal 4 (Tegal Timur) sehingga menyebabkan pada pemilu 2019 petahana Nur Fitriani memilih pindah dapil ke dapil Kota Tegal 3 (Tegal Barat).

Tabel 1.4
Keterpilihan Petahana dalam Pemilu 2019

No	Nama Petahana	Partai Politik	Jumlah Suara Pemilu 2014	Jumlah Suara Pemilu 2019	Keterangan
1	Tuti Alawiyah	PAN	1.835	625	Gagal
2	Nur Fitriani	PAN	1.996	1.827	Terpilih
3	Enny Yuningsih	Golkar	1.097	1.120	Terpilih
4	Ely Rosana	Hanura	901	430	Gagal
5	Efi Ifannah	PKB	1.920	520	Gagal
6	Siti Maryam	PKB	987	-	Tidak mencalonkan
7	Riana Santy	Nasdem	1.227	-	Tidak mencalonkan
8	Rosalina	PDIP	2.405	1.925	Terpilih
9	Wiwik Mastuti	PDIP	980	621	Gagal
10	Sri Puji Astuti	PDIP	1.734	434	Gagal

Sumber : KPU Kota Tegal (diolah)

Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa pada Pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2019 dari 10 petahana perempuan hanya tiga orang yang berhasil terpilih dan lima petahana yang gagal, serta dua petahana yang tidak mencalonkan kembali. Tiga orang petahana perempuan yang berhasil terpilih kembali adalah, Rosalina, Nur Fitriani, dan Enny Yuningsih. Berdasarkan tabel diatas ada salah seorang petahana yang kembali berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tegal yaitu Rosalina yang mana dia kembali meraih kursi legislatif dengan perolehan suara terbesar.

Keterpilihan dan kesuksesan Rosalina menjadi satu-satunya calon petahana perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan suara

terbanyak menurut hasil dari (kpu.go.id) bukan merupakan satu kejutan atau hal baru, itu karena ia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan partai besar di Kota Tegal. Namun selain Rosalina yang berhasil terpilih, ada juga petahana perempuan dari partai yang sama dengannya yaitu PDIP, mereka adalah Wiwik Mastuti dan Sri Puji Astuti yang kembali maju dalam pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2019 namun keduanya gagal terpilih kembali. Selain itu ada juga beberapa petahana perempuan dari partai lain yang juga gagal terpilih dalam pemilu DPRD Kota Tegal tahun 2019, mereka adalah Tuti Alawiyah dari PAN, Ely Rosana dari Partai Hanura, dan Efi Ifannah dari PKB.

Menurut Marijan (2006) modalitas dalam kontestasi (studinya tentang pilkada) ada tiga modal utama yang harus dimiliki adalah modal politik (*politic capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal ekonomi (*economic capital*). Ketiga modal itu dapat mempengaruhi seorang kontestan dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan dan perolehan suara yang didapatkan.

Studi Muzadi dan Fitriyah (2019) pada kemenangan Een Rusmiyati merupakan satu-satunya calon anggota legislatif Kota Cirebon yang terpilih dari Partai Hanura untuk ketiga kalinya, karena yang bersangkutan mampu merawat konstituen dengan sangat baik, yang mana dalam perawatan konstituen tersebut berjalan efektif karena dibantu oleh tim sukses yang loyal.

Pemilihan umum (2014) menjadi pemilu ke empat pasca reformasi tahun 1998. Melalui sistem proporsional terbuka, pemilu 2014 memberikan peluang yang sama bagi setiap calon anggota legislatif untuk memenangkan kontestasi meraih kursi di semua level (DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kab/Kota). Melalui mekanisme perolehan suara terbanyak maka kemudian nomor urut caleg tidak menjadi jaminan bagi keterpilihan anggota DPR/D. Melalui mekanisme tersebut, persaingan antar caleg dalam satu partai juga menjadi semakin kuat. Membina konstituen dan masyarakat di daerah pemilihan selama lima tahun merupakan satu keharusan bagi petahana untuk kembali meraih kursi dalam pemilu disamping sebagai satu kewajiban sebagai anggota DPRD.

Melalui pembinaan tersebut anggota DPRD dapat memetik banyak keuntungan, tidak saja dalam rangka melaksanakan kewajibannya namun juga dapat membangun hubungan dengan konstituen secara lebih kuat sehingga bisa meningkatkan basis dukungannya dalam pemilu mendatang. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh caleg petahana adalah “kedekatan” dengan konstituen dan masyarakat yang dibangun selama lima tahun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD melalui distribusi bantuan sosial dan hibah.

Anggota DPRD (berdasarkan tradisi dan kesepakatan dengan eksekutif) memiliki ruang untuk mendistribusikan bantuan sosial dan hibah baik untuk keagamaan (masjid, TPQ, gereja) pertanian, peternakan, dan lain sebagainya kepada kelompok masyarakat yang diberikan sesuai dengan daerah pemilihan

masing-masing atau tujuan anggota DPRD tersebut. Hal tersebut kemudian lebih sering dikenal dengan ‘dana aspirasi’, meskipun tidak semua berbentuk uang (sebagian berbentuk barang seperti sapi, kambing). (Abdulrahman, 2015), Posisi dalam Penelitian ini adalah ingin mengetahui apa modalitas yang dimiliki petahana petahana perempuan sehingga berhasil terpilih dalam Pileg Kota Tegal 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa petahana perempuan dapat terpilih Kembali dalam Pemilu DPRD Kota Tegal 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis mengapa petahana perempuan dapat terpilih Kembali dalam Pemilu DPRD Kota Tegal 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis sebagai tambahan referensi ilmu pengetahuan khususnya mengenai keberhasilan petahana perempuan dalam pemilu legislatif tingkat lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi peneliti, dapat menjadi bahasan informasi yang mampu dikembangkan keberbagai aspek. Untuk menambah pengetahuan dan

wawasan peneliti dalam mengetahui apakah modalitas memang memiliki peran penting terhadap keberhasilan petahana dalam pemilihan legislatif.

Bagi petahana perempuan, dapat menjadi langkah yang langkah yang harus disusun secara matang agar dirinya dapat terpilih Kembali dalam pemilu legislatif berikutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Chalik (2017:1) dalam bukunya yang berjudul “*Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*” mengatakan bahwa Tensi politik dan emosional lebih kuat dibandingkan dengan hajatan politik yang lain, semisal Pemilu Legislatif, Pilpres maupun Pilgub. Maka segala cara akan digunakan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

Penelitian tentang keterwakilan perempuan dalam politik ada sejak konsep gender berkembang, tidak dapat dipungkiri lagi peran Perempuan dalam pembangunan telah mengalami pembaharuan. Di bidang Pendidikan misalnya, Perempuan telah mengalami peningkatan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Posisi-posisi penting baik di pemerintahan maupun non pemerintahan cukup banyak dijalankan oleh perempuan. Dalam bidang politik, yang seringkali disebut sebagai dunia laki-laki, aspirasi perempuan juga telah mendapat tempat walaupun belum semua aspek terwakili.

Sedangkan Sidarta (2008:17-19) dalam bukunya yang berjudul “Strategi Jitu Menggapai dan Kepala Daerah” mengemukakan Arus perubahan itu telah mendorong antusiasme para politisi, baik yang sudah tergolong kawakan maupun mereka yang baru berkecimpung untuk masuk

kegelanggang kompetisi guna memperebutkan kursi kekuasaan (*sites of political struggle*). Strategi pemenangan pemilihan dalam bahasan buku ini meliputi usaha mengoptimalkan sumber daya kandidat, meretas peta jalan dalam melakukan pencitraan, kampanye dan penggalangan pemilih, membentuktim (*team building*) yang efektif untuk pemenangan kandidat, serta penggunaan jasa konsultan pofesional.

Upaya untuk memberdayakan Perempuan dalam Pembangunan telah dilakukan melalui berbagai pendekatan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan peran Perempuan dalam pembangunan. Pembangunan adalah suatu perubahan perilaku (kognisi, efeksi, dan keterampilan) positif yang akan membawa kemanfaatan bagi orang banyak yaitu, Masyarakat secara keseluruhan. Namun fakta empiris menunjukan bahwa perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang pembangunan dan aspek kehidupan. Ketertinggalan perempuan seperti ini akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi keseluruhan Pembangunan jika tidak diperbaiki. Karena itulah peningkatan peran perempuan dalam Pembangunan merupakan kesepakatan dunia yang dimulai pada tahun dekade Perempuan sebagai tonggak pertama pencanangan peningkatan peran Perempuan untuk kemanfaatan pembangunan (Vitayala, 2010:93).

Pendekatan gender dan Pembangunan merupakan Upaya untuk menumbuhkan kemitra sejajaran lelaki dan Perempuan dalam konteks kehidupan yang luas. Kemitra sejajaran lelaki dan perempuan yang

dimaksudkan adalah mencakup kebersamaan dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, pengawasan sumber daya dan kekuasaan, pengambilan kekuasaan keluarga terhadap penggunaan sumber daya dan hasilnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang dibayar, partisipasi politik, dan berbagai upah yang lebih adil. Hanya saja perempuan selalu di posisikan pada peran domestik dan reproduksi yang sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau streotype tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam Masyarakat, sehingga perempuan susah untuk ikut berpolitik.

Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembagian kerja social dalam masyarakat. Pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan di internalisasikan orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan. Internaliasasi sedemikian rupa menurut melahirkan pelabelan atau streotype bahwa laki-laki adalah sosok yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi keluar, penegasandiri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri (Abbas, 2006).

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya, bisa dikatakan terlambat. Hal itu dikarenakan banyak stigma yang mengatakan bahw a perempuan identic dengan sektor domestic sehingga masih sangat sedikit perempuan yang turut

andil dalam dunia politik. Sementara dunia politik itu sendiri dianggap lekat dengan dunia yang keras, penuh persaingan, membutuhkan rasionalitas dan bukan emosi, ini dianggap ciri-ciri yang melekat pada laki-laki.

Persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah lelaki. Secara jelas memiliki jalur yang *judgement*, dengan tendensi orang kelas dua yang seharusnya dirumah dan bertabrak dengan konsumerisme, hedonism dalam cengkraman kapitalis menganggap perempuan sebagai mahluk lemah memberikan asupan pemikiran bahwa perempuan tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan dialektika kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan tegas karena patron yang telah membentuk perempuan sebagai mahluk perasaan, artinya perempuan tidak dapat memberikan keputusan ketika menggunakan sisi perasaan dalam menilai sebuah keputusan (Putra, 2012).

Menurut Chalik, (2017:16-19) terdapat tiga bentuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi kemenangan petahana terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, yaitu kekuasaan terlihat, kekuasaan tersembunyi dan kekuasaan tidak terlihat. Kekuasaan yang terlihat (*visible forms of power*) terwujud dalam kekuasaan yang melembaga, yang secara langsung dapat menentukan arah kebijakan politik. Mereka adalah partai politik, atau lembaga yang memiliki kemampuan untuk menentukan Kebijakan politik.

Dalam konteks Pilkada, Parpol pengusung atau lembaga yang mendukung secara langsung terhadap calon kepala daerah dikategorikan dengan kekuasaan “yang terlihat”. Strategi target dalam kekuasaan yang terlihat menyangkut “Siapa, Apa dan Bagaimana”. Siapa yang dicalonkan atau dipersiapkan menjadi pemimpin, apa alasan-alasan mendorong atau mendukung seorang dan bagaimana cara untuk memenangkan suatu pertarungan.

Sementara dalam kekuasaan “yang tersembunyi” (*hidden power*) yang menjadi target utama bukanlah siapa yang akan diusung karena hal tersebut sudah memiliki kepastian politik, memiliki kepastian sudah didukung oleh masyarakat, tetapi “transaksi apa yang dilakukan antara aktor dan *voters*”, “apa yang akan dilakukan setelah kemenangan diperoleh”. Hal tersebut terkait dengan keuntungan apa, posisi apa, dan bargaining apa yang akan ditindak lanjuti setelah kemenangan.

Kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*). Dalam kekuasaan tidak terlihat, Masyarakat akan dibawa ke alam ketidaksadaran karena sudah terbius oleh janji-janji penguasa atau ideologi yang ditanamkan oleh penguasa. Kekuasaan “tidak terlihat” merupakan penanaman doktrin dan ideologi atas orang lain Melalui cara-cara yang halus. Seseorang tidak secara langsung mendoktrin atau mengajak dalam pilihannya, melainkan dengan cara memasukkan pikiran dengan merubah mind set seseorang. Pikiran seseorang akan digiring dengan kekuatan kata-

kata yang seolah dapat merubahs egalanya. Seseorang akan dibawa ke alam tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari orang lain.

Sementara Abdulrahman (2015) menyebutkan beberapa alasan atas kegagalan caleg petahana pada pemilu yaitu ketidak mampuan caleg petahana dalam menghadapi kompetisi internal dengan sesama caleg dalam satu partai, pragmatism pemilih, dan penyelenggara pemilu yang kurang professional. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Fadli, Bailusy, Nas, dan Zulfikar (2018) lebih memperjelas saat keterlibatan elit lokal cukup berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik. Elit politik local dalam hal ini adalah tokoh agama dan juga tokoh adat. Kampanye yang berjalan sejak petahana masih menjabat tercermin dari bagaimana cara petahana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Modal sosial yang berperan penting dalam membangun jaringan sosial atau transaksi adalah modal sosial penjembatanan. Bertolak belakang dengan modal sosial pengikatan, modal sosial ini bersifat inklusif. Orang-orang dengan modal sosial ini cenderung mengadakan transaksi atau menjalin hubungan sosial dengan banyak orang dari beragam latar belakang (seperti ideologi agama, pendidikan, ras, dll).(Santoso, 2020)

Daerah Pemilihan (dapil) atau wilayah dan arena kontestasi juga merupakan faktor penting yang menentukan keterpilihan petahana. Petahana yang telah menguasai atau memiliki modal politik dan sosial di salah satu dapil akan memiliki potensi keterpilihan yang lebih besar ketika petahana tersebut ditempatkan di dapil tersebut. Sebaliknya, ketika petahana

ditempatkan di dapil yang baru dimana petahana tersebut belum memiliki modal sosial yang kuat maka potensi keterpilihannya semakin kecil. Petahan dengan dapil yang sama tentu akan memiliki modal sosial yang lebih kuat ketimbang dengan dapil yang berbeda. Selama lima tahun (2014-2019) petahana tersebut memiliki peluang untuk membangun modal politik dan sosial di wilayah tersebut melalui berbagai kegiatan (Abdulrahman, 2015)

Pemilu legislatif Indonesia untuk mempelajari hubungan antara petahana, posisi daftar, karakteristik kandidat, dan keberhasilan pemilu dalam system proporsional daftar terbuka. Kelemahan petahana di negara-negara demokrasi berkembang besar petahana pribadi yang konsisten keuntungan di Indonesia. Keuntungan ini dimediasi oleh pilihan partai tentang bagaimana petahana dan pendatang baru di peringkat dalam daftar partai, sebuah heuristik utama bagi pemilih di lingkungan pemilihan dengan informasi rendah seperti Indonesia (Dettman, Pepinsky, dan Pierskalla, 2017).

Pendekatan modal sosial terletak pada fakta bahwa tidak hanya mencakup beberapa spesifik orientasi atau jenis perilaku saja untuk menggambarkan status kewarganegaraan seseorang. Modal sosial baik individu maupun kolektif memiliki efek positif terhadap kewarganegaraan demokratis. Modalitas berasal dari status kewarganegaraan seseorang baik secara individu ataupun kolektif memberikan efek yang positif (Vráblíková dan Deth, 2017). Sebagai hasil dari analisis literatur ini kegagalan dan keberhasilan petahana dipengaruhi oleh hubungan antara petahana dan konstituenya.

1.5.1. Peluang Keterpilihan petahana Perempuan dalam Kontestasi

Menurut Fitriyah dan Supratiwi (2022:61) dalam bukunya yang berjudul *“Jalan Perempuan keParlemen Lokal Pengalaman dari Jawa Tengah”* Pemilu legislatif 2014 sudah lebih maju lagi dalam hal pencalonan perempuan di banding pemilu-pemilu sebelumnya. Selain UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur ketentuan kuota perempuan sebesar minimal 30% dalam hal kepengurusan partai politik (Pasal 8), penetapan bakal calon bakal calon (Pasal 55), serta pengaturan penempatan urutan bakal calon (Pasal 56), selanjutnya ditindak lanjuti diatur dalam peraturan KPU (PKPU) No.7 Tahun 2013, PKPU No.15 Tahun 2013, dan PKPU No.17 Tahun 2013. Pengalaman pemilu berkali-kali menunjukkan peluang keterpilihan semakin besar jika nomor urutnya satu, namun presentase perempuan yang oleh partainya diletakan di nomor urut satu sangatlah kecil.

Gordon & Landa dalam Nawawi (2019, p. 24) menyatakan bahwa petahana yang kembali ikut serta dalam kontestasi politik pilkada di daerah setidaknya memiliki peluang yang sangat besar dari segi keuntungan dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan secara langsung adalah dari segi popularitasnya yang dikenal oleh Masyarakat sebagai kepala daerah, hubungan yang terjalin antara petahana dan konstituen menjadi begitu erat.

Kapasitas calon petahana akan lebih mendapatkan porsi di masyarakat yang kemudian memiliki dampak positif secara tidak langsung calon petahana akan selangkah di depan dari pasangan calon yang lain dalam

memetakan demografi, geografi, kapasitas, serta potensi ekonomi di daerah, pemahaman terhadap kultur hingga adat-istiadat dan lain-lainnya secara sistematis dan empiris Melalui kinerja hingga mobilisasi perangkat kerja yang ada di dalamnya. Kapasitas petahana dalam memenangkan pilkada akan dapat memenuhi apa yang disebut dengan agregate frame yaitu proses mendistribusikan isu dan persoalan yang terjadi di suatu wilayah petahana akan memprioritaskan berbagai persoalan tertentu, baik ekonomi, sosial, agama, kebudayaan dan lain-lainnya. Semua ini akan mengarah pada fakta bahwa langkah yang lebih mudah dalam membangun citra pada kampanye hingga menjelang pemilihan.

Sementara Sidarta (2008:33) mendefinisikan pemilu legislatif secara langsung adalah sebuah proses dimana rakyat menentukan sendiri kepada siapa ia mempercayakan keterwakilannya di parlemen. Rakyat menentukan sendiri ihwal figur-figur yang pantas untuk menjalankan fungsi merumuskan peraturan perundang-undangan (legislasi), merumuskan dan mengontrol kebijakan publik, serta perencanaan anggaran pembangunan di negeri ini. Mengingat pentingnya fungsi yang diemban wakil rakyat itulah, maka dalam ajang pemilihan umum itulah rakyat berkesempatan untuk memilih calon-calon legislatif yang dianggap tepat.

1.5.2. Modalitas dalam Pemilu

Definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material yang dapat memiliki nilai simbolik, serta modal budaya (yang di definisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal budaya dapat

mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasisosial yang terdapat di dalam suatu system pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasisosial tertentu.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat arti fisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dkitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan kedalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas,

kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan versi dunia sosial yang resmi.

Di dalam proses pilkada sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan pilkada manakala memiliki modalitas terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi dalam pilkada langsung, yaitu modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasilnya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Dalam menetapkan strategi kemenangan pilkada tidak hanya menyesuaikan kondisi pilkada itu sendiri dan arena kompetisi tetapi juga termasuk modalitas kandidat baik itu modalitas politik, sosial dan ekonomi. Modalitas saling berkaitan dan sangat menentukan kemenangan, karena itu modalitas yang harus dimiliki kandidat dalam mengikuti kontestasi politiknya itu tidak hanya modal sosial kandidat tetapi juga berupa dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi.

Menurut Stella (2019) 3 (tiga) modalitas yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti kontestasi pada Pilkada langsung, sebagai berikut :

1. Modal Politik

Kandidat dalam pilkada memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pilkada dan wakada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang. Namun pilkada dan wakada sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figure kandidat.

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit di banding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*) tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh Melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya, namun bisa juga petunjuk

yang tidak mencolok mata menunjukkan status tinggi pemiliknya : misalnya gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasi otoritas dan sebagainya, modal sosial (*social capital*) ialah hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial posisi pemilik modal dalam arena social ditentukan oleh jumlah dan bobot modal relatif mereka, dan oleh strategi tertentu yang mereka jalankan untuk mencapai tujuan-tujuannya, modal budaya (*cultural capital*) Modal budayadi bangun oleh kondisi keluarga dan pendidikan di sekolah, modal budaya pada batas-batas tertentu dapat beroperasi secara independent dari tekanan uang, dan bahkan memberikan kompensasi bagi kekurangan uang sebagai bagian dari strategi individu atau kelompok untuk meraih kekuasaan dan status, modal ekonomi (*economic capital*) pengetahuan yang sudah diperoleh, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, sopansantun, cara bergaul, dan sebagainya yang berperan didalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial. Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan nuraianya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan

penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

Ahli politik mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan / sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia Ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem motoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin dielaborasi, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk kata dibawah naungan institusi-institusi negara.

Pemilu merupakan sarana untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik

harus memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat persentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan. Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu dalam pilkada pengaruh figure lebih besar dan kompetisi antar partai (koalisi parpol) tidak terlalu menonjol. Peran figure kandidat dipandang sangat menentukan karena pilkada sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya.

Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Nurhasim, Moch. Dkk (2010). dalam *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Pusat Penelitian Politik (P2P) Lipi*. Jakarta jurnal Elit politik dalam konteks local yaitu :

“Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang

lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya”.

Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan. Modal politikya itu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan pilkada.

2. Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pilkada, karena untuk

membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial dibagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Menurut Robert Putnam (1993) modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desirable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).

Pierre Bourdieu (1986), mendefinisikan modal sosial sebagai :

“sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam Bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai Bentuk dukungan kolektif”.

Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-

bentuk *social capital* (modal sosial) berupa institusi local atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas social tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

James Coleman (1989) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur social serta memfasilitasi Tindakan individu dalam struktur social tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal social berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontraksosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda Ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.

Dari sudut pandang lain, North dan Olson (1970) menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, system peradilan, serta kebebasan sipil dan politik. Sementara bahasan mengenai trust jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal

sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (*social capital*) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama antara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (*high-trust society*). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (*low-trust society*) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan zero trust society, ketiadaan kepercayaan. Analoginya adalah Ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

3. Modal Ekonomi

Dalam pilkada tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak

sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik.

Para ekonomi telah lama berbicara mengenai modal (*capital*) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (*finansial capital*). Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas. Modal finansial juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.

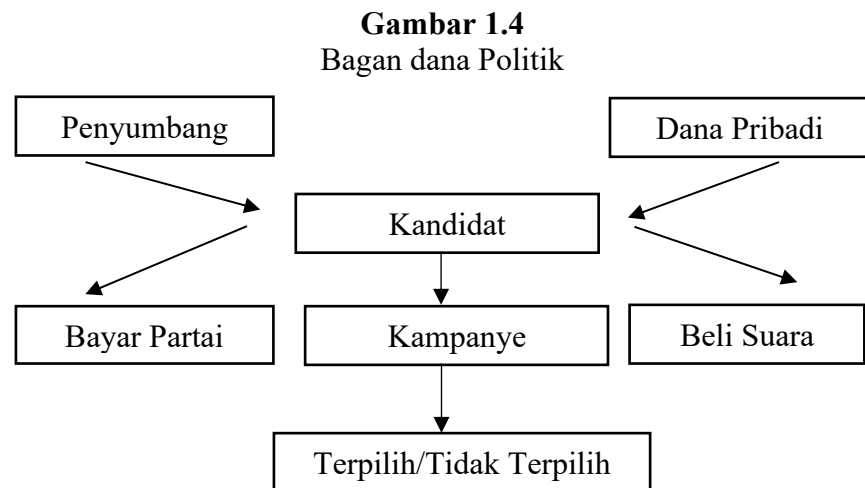
Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* seperti dikutip Augusto Bunga (2010), menggunakan istilah “*capital*” dengan arti : (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modalitas dalam artian barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama

produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen). dan (3) Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktik politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Ditambahkan (Sahdan dan Haboddin, 2009) bahwa setiap penyelenggaraan pilkada membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan. Dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perorangan maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartikan sebagai wujud konkret dari partisipasi dan dukungan Masyarakat terhadap pasangan calon kepaladaerah.

Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan Bentuk peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada penggunaan dana politik dilakukan oleh calon pasangan tidak hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Tetapi juga mengenai pengeluaran pasangan calon untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat (Sahdan dan Haboddin, 2009).

Berikut adalah alur bagaimana politik yang dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya :



Sumber : Sahdan dan Haboddin, 2009

Bagan di atas menunjukkan bahwa dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan penyumbang dari simpatisan (*donatur*) baik secara perorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli suara. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam system pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apa lagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Hal inilah yang membuat kandidat dan proses pilkada mengakibatkan dana politik yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan keperluan cost politik lainnya oleh kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan berdasarkan penggunaannya dan besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi alasan penyumbang dana pribadi kandidat kampanye

Terpilih/Tidak Terpilih Bayar Partai Beli Suara parpol mengusung kandidat dan mengambil keuntungan dari kekuatan modalitas kandidat.

Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk kemenangan pilkada.

1.5.3 Tim Sukses dalam Pemilu

Menurut (Cangara,2014) Tim sukses direkrut dari tenaga-tenaga potensial sesuai tugas dan fungsinya. Sebuah kegiatan pemasaran politik sedapat mungkin diawali dengan kegiatan pembentukan tim kerja yang disebut “tim sukses”. Sebuah tim sukses biasanya terdiri dari :

1. Penasihat

Penasihat berfungsi memberi masukan dalam hal strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh organisasi atau kandidat dalam mencapai tujuan, seperti memenangkan pemilu dan merangkul pihak-pihak yang menentukan dalam pemberian suara. Para penasihat ditunjuk pada umumnya punya kematangan dan pengalaman sebagai politisi, dan mengikuti perkembangan dengan melihat dimensi-dimensi strategi yang tidak dilihat oleh orang lain.

2. Tim Ahli

Tim ahli ialah kelompok ahli yang diangkat menurut bidangnya. Tugas tim ahli adalah menyusun program yang akan dibawakan oleh kandidat dan *memback-up* kandidat jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bidang keahliannya.

3. Tim Riset

Tim riset ialah kelompok para peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan organisasi, partai atau kandidat. Misalnya pendapat masyarakat tentang kapabilitas kandidat.

4. Tim Kampanye

Tim kampanye ialah mereka yang merencanakan dan menggerakkan kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan organisasi atau partai. Untuk menggerakkan kampanye seharusnya ditunjuk seorang manajer kampanye yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan strategi komunikasi, atau yang memiliki pengetahuan dalam bidang politik, tetapi memiliki pengalaman dan hubungan yang baik dengan sosial.

5. Tim Penggalang Massa

Tim penggalang massa adalah orang-orang yang direkrut untuk menggalang massa, baik untuk kepentingan pengumpulan suara maupun *show force* untuk menunjukkan kekuatan kandidat kepada Masyarakat atau calon pemilih. Penggalangan massa biasanya dilakukan untuk kampanye public dilapangan terbuka, pawai, atau konser musik. Penggalangan massa juga dilakukan untuk mengingatkan para pemilih untuk datang ramai-ramai ketempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.

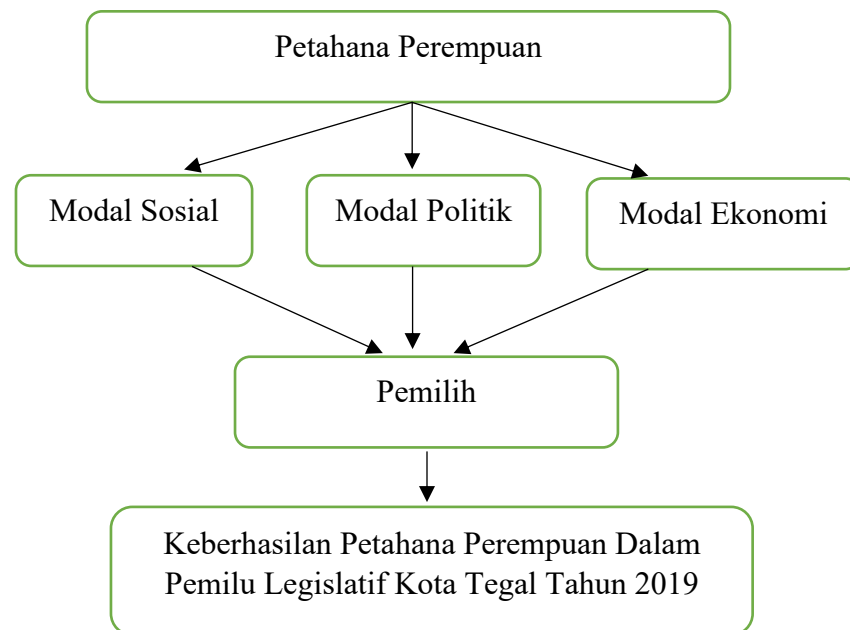
6. Tim Pengamat

Kelompok ini dibentuk untuk mengamati dan mengawasi tindak tanduk lawan politik yang membahayakan citra kandidat. Tim pengamat menyampaikan informasi kepimpinan kandidat atau organisasi untuk segera diambil tindakan dalam mengatasi hal tersebut.

7. Tim Pengumpul Suara (*Vote Getter*)

Mereka terdiri dari orang-orang yang direkrut karena pengaruh yang besar dalam masyarakat. Mereka biasanya memiliki pengaruh dan kedudukan sosial.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berimplikasi pada penggunaan ukuran-ukuran kualitatif secara konsisten, artinya dalam pengolahan data, sejak mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan menyimpulkan data tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Selanjutnya, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher*

builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting (Creswell, 2010).

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitis, Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis Menurut Narbuko (2015, hlm. 44), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan kata lain Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat Penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

1.7.2 Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) “Sumber data utama dalam Penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber pengambilan data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada subjek atau informan penelitian yang memahami topik penelitian.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi-informasi yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan laporan kegiatan, artikel media massa, arsip, dokumentasi dan lain sebagainya yang berhubungan.

1.7.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini bersumber pada orang yang benar-benar tahu dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Teknik pengambilan informan menggunakan purposif. Informan dalam penelitian ini ialah :

1. Petahana Perempuan yang berhasil terpilih (Rosalina PDIP, Enny Yuningsih Partai Golkar, Nur Fitriani PAN)
2. Tokoh Masyarakat (Maryam, Mutmainah, Sugiharti)
3. Tim sukses (Siti Khodijah, Karyoto, Sarmila)
4. Parpol Pengusung (Muji PDIP, Sugiyono Partai Golkar, Dani PAN)

Mereka adalah sebagai sumber informasi utama, peneliti menggunakan penekanan *informed consent*, yaitu informan memahami dan memberikan izin bahwa informan akan diteliti dan akan dikutip dalam penelitian. Kerahasiaan identitas informan serta keamanan pribadi informan dijaga oleh peneliti.

1.7.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan sebagai pengumpul data penelitian

dengan bantuan beberapa alat pendukung seperti buku, dokumen, pedoman wawancara, fotografi kamera, dokumen, tape-record. Maka dari itu, peneliti sebagai instrument melakukan validasi terkait dengan kesiapan melakukan penelitian sebelum peneliti terjun kelapangan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (Maleong, 2013: 186). Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016: 137) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan mengapa petahana perempuan dapat terpilih Kembali dalam Pemilu DPRD Kota Tegal 2019. Selanjutnya untuk menggali informasi yang lebih mendalam peneliti mengajukan pertanyaan diluar dari pedoman wawancara, namun masih berhubungan dengan topik penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Menurut sugiyono (2016:329) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam Penelitian ini antara lain peraturan-peraturan dan jurnal yang berhubungan dengan petahana perempuan, pemilu, dan berbagai dokumen lain yang mendukung.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang di kumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan tehnik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2017:133), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis data yaitu model Miles & Huberman dalam sugiyono (2017:132) dengan tahapan pengumpulan data yaitu :

1. *Data Collecting* (pengumpulan data) merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrument kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi.
2. *Data Reduction* (reduksi data) yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporan lapangan dirangkum, dipilihhal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil juga mempermudah peneliti untuk mencari data bila diperlukan.
3. *Data Display* (Penyajian Data) menurut Miles Huberman dalam sugiyono (2017:137) menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi data. Peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus di verifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.